

ABSTRAK

Untuk merespon situasi dan kondisi kekinian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibutuhkan Peraturan Daerah yang lebih terfokus dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Disamping itu Peraturan Daerah juga harus mengungkapkan secara eksplisit perlunya program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang komprehensif, berkelanjutan dan bersifat lintas sektoral. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjadi landasan hukum program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Jawa Timur yaitu Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Produk hukum yang mengatur pemberdayaan maka selayaknya hal itu dijadikan dasar implementasi di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Jombang. Proses implementasi perda ini menurut model implementasi kebijakan publik yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier terdapat 3 variable, yaitu variable independen, variable intervening, dan variable di luar produk hukum yang dapat mempengaruhi proses implementasi. Variable independen merupakan variable yang berisi mudah tidaknya kebijakan itu diimplementasikan. Variable intervening merupakan variable yang dapat menstruktur proses implementasi kebijakan publik tersebut. Sedangkan variable di luar produk hukum berisi tentang kondisi sosial, dukungan publik, dan kemampuan pemimpin pelaksana.

Berdasarkan penelitian, program dan kegiatan pemberdayaan UMKM Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Koperasi dan UMKM adalah penyediaan bantuan teknis (pelatihan, penelitian) dan pendampingan serta manajemen kelembagaan dan SDM, fasilitasi dalam membuka dan mengembangkan akses pasar bagi produk-produk UMKM. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Perda Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2011

Kata Kunci: Implementasi kebijakan publik, peraturan daerah, pemberdayaan, dan UMKM

ABSTRACT

To respond to the situation and the present condition of the empowerment of Micro, Small and Medium needed Regional Regulation more focused and able to meet the needs of offenders Micro, Small and Medium Enterprises. Besides, Regional Regulation should also explicitly express the need for empowerment of Micro, Small and Medium comprehensive, sustainable and cross-sectoral. Related to this Provincial Government sets the East Java Provincial Regulation on the Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises to be a legal basis for empowerment programs for Micro, Small and Medium Enterprises in East Java East Java, namely Regulation No. 6 of 2011 on Micro, Small and Empowerment and Medium Enterprises (SMEs).

Empowerment laws governing product then it should be the basis of implementation in the entire region of East Java, including in Jombang. Implementasi this regulation process according to the model of public policy implementation offered by Daniel Mazmanian and Paul Sabatier there are three variables, namely the independent variable, intervening variables, and variables outside the laws that may affect the implementation process. Independent variable is a variable that contains easily whether the policy is implemented. Intervening variable is a variable that can structure the process of implementation of public policy. While variable outside legal product contains about social conditions, public support, and the ability of executive leaders.

Based on the research programs and activities to empower SMEs Jombang District Government through the Department of Cooperatives and SMEs is the provision of technical assistance (training, research) and mentoring as well as institutional and human resource management, facilitation in opening and developing market access for products of SMEs. This is in accordance with the mandate in East Java Province Regulation No. 6 of 2011

Keywords: Implementation of public policy, regulatory regions, empowerment, and SMEs